

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt



buletin.adalah

Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia

Zahrotunnimah*

Salah satu artikel menarik terkait Politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait sejarah politik identitas dan nasionalisme di Indonesia. Apalagi politik identitas dan nasionalisme mendapat ruang yang sangat istimewa beberapa tahun belakangan ini, baik dalam praktek maupun studi keilmuan di bidang politik dan sosiologi. Salah satu pelajaran yang dapat dipahami adalah bahwa dalam studi pasca-kolonial, sebenarnya politik identitas dan sosiologi sudah lama digeluti. Bisa dikatakan bahwa para Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak adalah nama-nama yang mendalami hal tersebut.

Kontribusi mereka dalam hal ini adalah telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul-betul dipilah, sehingga terlihat perbedaan yang jelas tentang apa itu politik identitas (*political of Identity*) dan apa itu identitas politik (*political identity*). Identitas politik (*Political identity*) merupakan sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek, di dalam ikatan suatu komunitas politik. Adapun politik Identitas (*political of identity*) akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi



sumber dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Sangat dipahami bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktek politik kekinian. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU saat ini.

Sebenarnya Donald L Morowitz (1998), salah satu pakar politik dari universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Garis penentuan tersebut tentu akan

tampak tidak dapat dirubah. Karena itu maka status baik sebagai anggota dan bukan anggota akan terlihat bersifat permanen. Sedangkan para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas lainnyapun, telah mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Sebut saja Agnes Heller misalnya, yang telah mendefinisikan politik identitas adalah sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

Agnes Heller (Abdillah, 2002: 22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini sebagai politik, yang difokuskan pada suatu

pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.

Bagaimana Nasionalisme berperan dalam praktek politik? Dalam hal ini bahasan terkait nasionalisme dalam perspektif antropologi, sebagaimana yang dikutip dalam Gellner (1983), bahwa nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang beranggapan bahwa tapal-tapal batas budaya mesti bersepadanan dengan tapal-tapal batas politik, artinya bahwa negara harus mencakup hanya orang yang "berjenis sama". Nasionalisme muncul sebagai akibat dari tanggapan terhadap industrialisasi dan keterceraian orang-orang dari rupa-rupa ikatan primordial kepada kekerabatan, agama dan komunitas lokal. Dalam catatan sejarah Indonesia dikatakan, bahwa peran ideologi nasionalisme dalam politik di Indonesia, dimulai oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Budi Utomo. Melalui Organisasi inilah kemudian dipandang sebagai lambang kelahiran kesadaran nasionalisme di antara kaum pribumi dengan mencetuskan "Sumpah Pemuda" sebagai suatu komitmen politik mengaspirasikan semangat nasionalisme mereka.

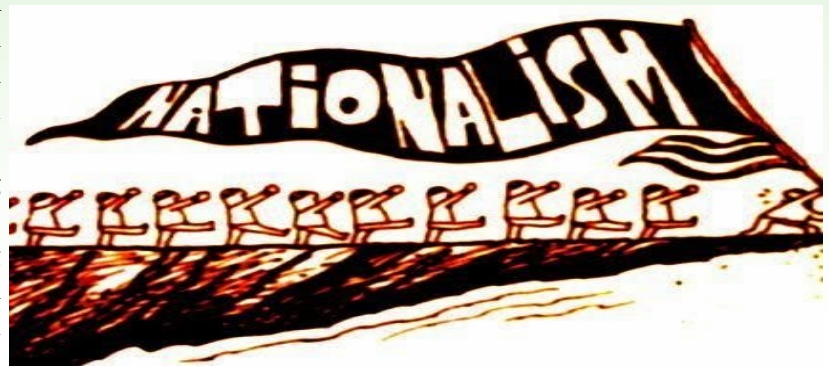
Politik Identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Ma'arif dalam bukunya *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma'arif, 2012: 55). Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas tersebut. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.

Tentu berbeda dengan pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu, yang awal mulanya

merupakan sebuah ideologi, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang dimulai dengan penerbitan koran Medan Prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Tirtoadisoerjo. Sikap kritisnya selalu dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang tentu banyak membuat para pejabat-pejabat Hindia Belanda geram, begitupun pengungkapan-pengungkapan skandal-skandal korupsi di lingkungan birokrasi kolonial. Akibatnya, tahun 1912 surat kabar ini dilikuidasi dengan alasan utang dan penipuan, dan Tirtoadisoerjo dibuang ke Ambon.

Berbeda halnya di Era politik kontemporer saat ini, politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas.

Oleh karena itu, bila dilacak dari sejarah Indonesia, politik identitas yang muncul cenderung bermuatan



etnisitas, agama dan ideologi politik. Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk ditelaah jika dihubungkan dengan penguatan nasionalisme bangsa.[]

Pustaka Acuan:

- *Penulis adalah mahasiswa Program Ph.D Kazan Federal University (KFU) Russia, sekaligus Dosen Tetap FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat.
- Abdillah, Ubed. *Politik Identitas Etnis. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press. 1983.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta, Democracy Project, 2012.
- Setyaningrum, Arie. "Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam "Politik perlawanan" Yogyakarta: IRE, 2005.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah